



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH**

TAHUN 2024

URUSAN KEWILAYAHAN

**KECAMATAN BEBER
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

TAHUN 2024

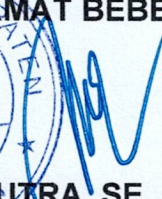


**KECAMATAN BEBER
KABUPATEN CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jois Putra, SE., M.A.P.
NIP : 19850207 200604 1 004
Pangkat : Pembina
Jabatan : Camat Beber

Menyatakan bahwa data yang kami kirimkan untuk penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beber, 2 Januari 2025
CAMAT BEBER,

JOIS PUTRA, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 19850207 200604 1 004



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia- Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan media informasi sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas serta sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan baik secara formal maupun non formal.

Beber, 2 Januari 2025

**KAMAT BEBER,**
JOIS PUTRA, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 19850207 200604 1 004

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum

- (1) Rincian Perangkat Daerah dan Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah
- (2) Rincian Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Beber
- (3) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (4) Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Kewilayahan

II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 3.1 Tugas Pembantuan Pusat
- 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi
- 3.3 Permasalahan dan Kendala
- 3.4 Saran dan Tindak Lanjut

IV. PRESTASI-PRESTASI

V. PENUTUP

VI. LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum

Kecamatan Beber menangani Urusan Pemerintahan di Kabupaten Cirebon. Kecamatan Beber mempunyai luas Wilayah 23,25 km dengan jumlah penduduk 47.022 Jiwa terdiri dari laki-laki 24.083 jiwa dan perempuan 22.939 jiwa, yang tersebar di 10 Desa, 34 dusun, 60 RW, 174 RT. Kecamatan Beber terletak disebelah Barat Kabupaten Cirebon dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Talun
- 2. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Greged
- 3. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Kuningan
- 4. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Kuningan

Kecamatan Beber memiliki 10 Desa sebagai berikut:

- 1. Desa Beber
- 2. Desa Halimpu
- 3. Desa Wanayasa
- 4. Desa Cipinang
- 5. Desa Kondangsari
- 6. Desa Patapan
- 7. Desa Sindangkasih
- 8. Desa Sindanghayu
- 9. Desa Ciawigajah
- 10. Desa Cikancas

(1) Rincian Perangkat Daerah dan Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berikut dasar hukum pembentukan perangkat daerah.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	Kecamatan Beber	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
2.	Kecamatan Beber	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan.

(2) Rincian Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan X

Berikut rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kecamatan Beber.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	Kecamatan Beber	Unsur Kewilayahan	8	-	5	13

(3) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Beber mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.3.019.487.968,00 dengan realisasi sejumlah Rp.2.894.748.939,00 atau 95,87%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.124.739.029,00. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel Pendapatan dan Belanja

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	Rp. XXX	Rp. XXX	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. XXX	Rp. XXX	
4.1.01	Pajak Daerah	Rp. XXX	Rp. XXX	
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp. XXX	Rp. XXX	
	Dst.			
5.	BELANJA DAERAH	RP.3.019.487.968,00	RP.2.894.748.939,00	95,87
5.1.	BELANJA OPERASI	RP.2.775.841.968,00	RP.2.651.572.939,00	95,52
5.1.01.	Belanja Pegawai	RP.2.364.277.000,00	RP.2.240.640.340,00	94,77
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	RP.411.564.968,00	RP.410.932.599,00	99,85
5.2.	BELANJA MODAL	RP.243.646.000,00	RP.243.176.000,00	99,81
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	RP.143.646.000,00	RP.143.646.000,00	100,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	RP.100.000.000,00	RP.99.530.000,00	99,53

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Beber tidak memperoleh Anggaran yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat.

Tabel. Anggaran APBN dan APBD Provinsi

NO	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (%)	%	KET
1	APBN					
1.1	Kementerian XXX					
2	APBD Provinsi Jabar					
2.1	Kecamatan XXX					

(4) Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Kewilayahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
1	Unsur Kewilayahan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.695.070.468,00	Rp2.570.931.440,00	95,39 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	121157600	120557600	99,50 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105216100	105216099	100,00 %
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	98043800	98043800	100,00 %

II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

Tabel. Pelaksanaan Urusan Kewilayahan pada Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2024

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERM ASAL AHAN	UPAYA MENGA TASI PERMA SALAH AN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Non Urusan	Kecamatan Beber		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah	100 Prosen	Rp2.695.070.468,00	100 Prosen	95,39%	Rp2.570.931.440,00	95,39%			(1) Rekomendasi
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	7 Dok	Rp2.688.000,00	7 Dok	100,00%	Rp2.688.000,00	100,00%			...
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp1.194.500,00	2 Dokumen	100,00%	Rp1.194.500,00	100,00%			Tindak Lanjut
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	Rp1.493.500,00	15 Laporan	100,00%	Rp1.493.500,00	100,00%			...
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dok	Rp2.368.170.100,00	8 Dok	94,78%	Rp2.244.533.440,00	94,78%			Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Rp2.364.277.000,00	13 Orang/bulan	94,77%	Rp2.240.640.340,00	94,77%			...
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp1.692.900,00	1 Laporan	100,00%	Rp1.692.900,00	100,00%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18 Laporan	Rp2.200.200,00	18 Laporan	100,00%	Rp2.200.200,00	100,00%			(2) Rekomendasi

					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi tingkat kecamatan	11 Laporan	Rp69.620.700,00	11 Laporan	99,99%	Rp69.613.600,00	99,99%			Dst...
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp2.387.000,00	12 Paket	100,00%	Rp2.387.000,00	100,00%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp44.212.000,00	7 Paket	100,00%	Rp44.212.000,00	100,00%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Rp2.185.300,00	8 Paket	99,68%	Rp2.178.200,00	99,68%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Rp3.060.000,00	5 Dokumen	100,00%	Rp3.060.000,00	100,00%			
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	Rp15.321.600,00	50 Paket	100,00%	Rp15.321.600,00	100,00%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp1.260.000,00	12 Laporan	100,00%	Rp1.260.000,00	100,00%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	Rp1.194.800,00	65 Laporan	100,00%	Rp1.194.800,00	100,00%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan administrasi barang milik daerah tingkat kecamatan	7 Laporan	Rp100.000.000,00	7 Laporan	100,00%	Rp100.000.000,00	100,00%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp100.000.000,00	1 Unit	100,00%	Rp100.000.000,00	100,00%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Rp25.473.768,00	4 Laporan	99,90%	Rp25.448.500,00	99,90%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp20.193.768,00	2 Laporan	99,87%	Rp20.168.500,00	99,87%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Rp5.280.000,00	11 Laporan	100,00%	Rp5.280.000,00	100,00%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Rp129.117.900,00	12 Laporan	99,64%	Rp128.647.900,00	99,64%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp129.117.900,00	1 Unit	99,64%	Rp128.647.900,00	99,64%			

2	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Beber		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Prosen	Rp121.157.600,00	100 Prosen	99,50%	Rp120.557.600,00	99,50%			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan	10 Jenis	Rp28.299.000,00	10 Jenis	100,00%	Rp28.299.000,00	100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Rp28.299.000,00	12 Dokumen	100,00%	Rp28.299.000,00	100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.	5 Kegiatan	Rp42.858.600,00	5 Kegiatan	100,00%	Rp42.858.600,00	100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp42.858.600,00	12 Laporan	100,00%	Rp42.858.600,00	100,00%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	4 Jenis	Rp50.000.000,00	4 Jenis	98,80%	Rp49.400.000,00	98,80%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	Rp50.000.000,00	8 Laporan	98,80%	Rp49.400.000,00	98,80%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 Prosen	Rp105.216.100,00	100 Prosen	100,00%	Rp105.216.099,00	100,00%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Laporan	Rp105.216.100,00	3 Laporan	100,00%	Rp105.216.099,00	100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	Rp105.216.100,00	10 Laporan	100,00%	Rp105.216.099,00	100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Prosen	Rp98.043.800,00	100 Prosen	100,00%	Rp98.043.800,00	100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Laporan	Rp50.000.000,00	3 Laporan	100,00%	Rp50.000.000,00	100,00%			

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Rp50.000.000,00	4 Laporan	100,00%	Rp50.000.000,00	100,00%			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	Rp48.043.800,00	4 Laporan	100,00%	Rp48.043.800,00	100,00%			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	Rp48.043.800,00	3 Laporan	100,00%	Rp48.043.800,00	100,00%			
Jumlah							Rp3.019.487.968,00			Rp2.894.748.939,00				

II. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Beber tidak memperoleh Anggaran yang berasal dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Tugas Pembantuan Pusat

Tabel. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2024

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian X	Peraturan Menteri/LPNK No.... Tahun... Ttg....	Program XXX Kegiatan XXX Output XXX Rincian Kegiatan XXX								
	Badan X										
	Dst.										
	JUMLAH TOTAL TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PUSAT										

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi

Tabel. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2024

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bidang X	Peraturan Gubernur No.... Tahun... Ttg....	Program XXX Kegiatan XXX Output XXX Rincian Kegiatan XXX								
	Dst.										
	JUMLAH TOTAL TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI										

3.3 Permasalahan dan Kendala

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Kecamatan Beber menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Urusan Kewilayahan

Hambatan/Permasalahan:

- a. Sering terkendala ketika proses pembuatan dokumen adminduk terutama KTP dikarenakan kurangnya blanko

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima kecamatan X sebagai berikut :

1. Urusan Kewilayahan

Saran dan Tindak Lanjut:

- a. Mengusulkan ke Disdukcapil untuk menambah kuota blanko di Kecamatan Beber

IV PRESTASI-PRESTASI

1. Penghargaan Radar Cirebon Person Of the Year tahun 2024 kategori Penggerak Pembangunan Desa untuk Camat Beber Jois Putra, SE., MAP.

V. PENUTUP

Pemerintah Kecamatan Beber telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaan dan kebijakan Negara (public policy) yang ada. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, sekaligus dalam rangka upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Cirebon yaitu “Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”, atau “BERSAMA” Tahun 2019-2024.

Pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Beber sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban Camat Beber yang merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan Pemerintahan untuk dilaporkan dan dievaluasi. Hasil perhitungan secara mandiri (self assessment) dan evaluasi secara mandiri (self evaluation) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan pembangunan yang mencakup program-program dan kegiatan-kegiatan baik Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Non Urusan dan Tugas Pembantuan selama tahun 2024 sebagian besar/mayoritas menunjukkan tingkat keberhasilan (outcome) yang baik. Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2024, diharapkan upaya terciptanya good governance sebagai tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan. Kecamatan Beber yang makmur dan mandiri, masyarakat yang bertakwa, sejahtera, berdaya dan berdaulat, partisipatif dan berkeadilan dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan secara khusus tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan dapat berhasil sebagai komitmen yang telah ditetapkan bersama.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Kecamatan Beber Tahun 2024
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Beber Tahun 2024